



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGAWASI PEKERJA LANJUT
USIA POTENSIAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
DI PT KAMPARINDO AGRO INDUSTRI**

SKRIPSI



OLEH:

BUDIMAN
NIM. 11720715206

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**



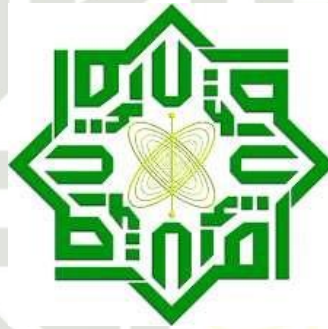
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGAWASI PEKERJA LANJUT
USIA POTENSIAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
DI PT KAMPARINDO AGRO INDUSTRI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH:

BUDIMAN
NIM. 11720715206

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran Dinas Sosial Dalam Mengawasi Pekerja Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Di PT Kamparindo Agro Industri”** yang ditulis oleh:

Nama : Budiman

NIM : 11720715206

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2021 M

Pembimbing Skripsi

H. Mhd. Kastulani, SH., MH
NIP. 196309091990021001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGAWASI PEKERJA LANJUT USIA POTENSIAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA DI PT KAMPARINDO AGRO INDUSTRI"** yang ditulis oleh:

Nama : **BUDIMAN**
 NIM : **11720715206**
 Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : **Rabu/ 28 Juli 2021**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Daring / Online**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juli 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua
Dr. Jenita, SE., MM

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji I
Hellen Last Fitriani, SH., MH

Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

41006 200501 1 005

Usia tua adalah masa paling akhir dalam kehidupan manusia di dunia. Berbagai perubahan kondisi pun akan dialami oleh setiap orang di masa tuanya, baik secara biologis, psikologis dan sosial yang saling berinteraksi satu sama lain akibat pertambahan usia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dilapangan. Lokasi diadakan penelitian ini adalah di PT Kamparindo Agro Industri Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, serta di Dinas Sosial Kabupaten Siak. Sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial, Manager, Kepala HRD, Kepala KTU, Kepala Administrasi, Laboratorium serta Buruh PT Kamparindo Agro Industri.

Berdasarkan penelitian, peran atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak dalam mengawasi pekerja lanjut usia potensial yang timbul, dari beberapa program kerja dan kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan di antaranya adalah sebagai berikut: Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dari berbagai upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial tersebut, Dinas Sosial dapat dikategorikan sudah “berperan” akan tetapi, peran yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam mengawasi pekerja lanjut usia potensial masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum dilaksanakan secara merata pada semua Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Siak.

Adapun yang menjadi kendala peran atau upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial, antara lain: Tingkat keseriusan masyarakat dalam memberdayakan kelompok atau komunitasnya yang masih rendah; Lokasi yang cukup jauh dan sulit untuk ditempuh dalam rangka melakukan pengamatan (pengawasan) secara langsung terhadap kelompok atau komunitas yang akan diberdayakan; Kurangnya pemerataan pemberian bantuan ke masing-masing kelompok usaha pada tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Siak.

Kata Kunci: Dinas Sosial, Lanjut Usia, Peran



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas barokah yang selalu diberikan-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Dinas Sosial Dalam Mengawasi Pekerja Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Di PT Kamparindo Agro Industri”**. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Sang teladan yang membawa kita ke zaman yang penuh dengan kebaikan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam menempuh studi S1 untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya karya ini tidak terlepas dari bantuan dan do'a, dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan doa kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis cintai, Bapak Aiptu Pol Asnawi dan Ibu Kasini, Amd.Keb, yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do'a, kasih sayang keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis juga memberikan dukungan penulis baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ketua jurusan Ilmu Hukum bapak Firdaus, SH., MH., beserta sekretaris jurusan bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum., yang telah memberikan wawasan beserta fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak H.Mhd. Kastulani, SH., MH., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Budi Azwar, SE., M.Ec selaku pembimbing akademik yang telah memberikan wawasan dan arahan dalam melaksanakan perkuliahan sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen yang telah mendidik penulis selama perkuliahan serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas bantuannya.
8. Bapak Bambang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian demi menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Wan Idris, S.Sos., MM yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian demi menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman jurusan ilmu hukum konsentrasi hukum tata negara 2017 yang telah memberikan do'a dan semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Sukses untuk kita semua
11. Kepada seseorang yang selalu memotivasi dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini yaitu Yesi Rasela, S.Si
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu atas selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga dengan senang hati, penulis menerima segala kritik dan saran-saran yang sifatnya membangun dalam hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih.

Pekanbaru, 28 Juli 2021

Penulis

BUDIMAN
NIM. 11720715206

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Teori Peranan.....	15
B. Teori Peranan Dinas Sosial.....	16
C. Pengertian Teori Pekerja Sosial	17
D. Fungsi dan Tugas Pekerja Sosial	18
E. Peranan Pekerja Sosial	19
F. Pengertian Kesejahteraan Sosial	21
G. Tujuan Kesejahteraan Sosial.....	23
H. Fungsi Kesejahteraan Sosial	24
I. Pengertian Lanjut Usia	25
J. Perda Kabupaten Siak Tentang Penanggulangan Pekerja Lanjut Usia Potensial	29
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32
A. Profil Kabupaten Siak.....	32
B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Siak	33
C. Visi dan Misi Kabupaten Siak	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Siak	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Peran Dinas Sosial dalam Mengawasi Pekerja Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di PT Kamparindo Agro Industri.....	44
B. Faktor Penghambat Dalam Upaya Mengawasi Pekerja Lanjut Usia Potensial Di PT Kamparindo Agro Industri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Populasi dan Sampel	12
Tabel 2. Usia Responden	52
Tabel 3. Pendidikan Responden	53
Tabel 4. Pekerjaan Responden	54



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Usia tua adalah masa paling akhir dalam kehidupan manusia di dunia. Realitas ini sudah menjadi sunnatullah yang pasti dilalui oleh setiap orang jika dikaruniai usia panjang. Berbagai perubahan kondisi pun akan dialami oleh setiap orang di masa tuanya, baik secara biologis, psikologis dan sosial yang saling berinteraksi satu sama lain akibat pertambahan usia. Karena itu, kesejahteraan dan kualitas kehidupan manusia lanjut usia perlu mendapat perhatian khusus agar dimungkinkan dapat hidup secara produktif sesuai dengan kemampuannya.¹

Permasalahan global yang mengemuka dewasa ini adalah pertumbuhan penduduk lanjut usia yang diprediksi meningkat secara signifikan terutama di negara-negara berkembang. Indonesia termasuk salah satu negara berkembang yang diprediksi akan mengalami ledakan jumlah penduduk lanjut usia. Berdasarkan data World Health Organization (WHO), pada tahun 2000 diperkirakan terdapat 600 juta jiwa lanjut usia (usia lebih dari 60 tahun) di dunia, Angka ini diperkirakan akan mencapai sekitar 1,2 miliar orang pada tahun 2025 dan selanjutnya diperkirakan akan mencapai 2 miliar orang pada tahun 2050.²

Demikian pula data United Nations 2006, distribusi populasi lanjut usia saat ini sebanyak 65% tinggal di negara berkembang dan pada tahun 2025 akan meningkat mencapai kira-kira 75%. Sedangkan di Indonesia, pada tahun 2050 diperkirakan akan terdapat 80 juta lanjut usia, dengan rasio 60-69 tahun berjumlah 35,8 juta dan usia 70-79 tahun sebesar 21,4 juta dan 80 tahun ke atas berjumlah 15,8 juta jiwa.³

Sebagai respon atas kondisi global dan lokal tersebut, pemerintah merumuskan berbagai kebijakan dan program yang ditujukan kepada kelompok penduduk lanjut usia. Salah satu kebijakan yang dimaksud tertuang dalam Undang-

¹ Lihat Kementerian Kesehatan RI, *Gambaran Kesehatan Lanjut Usia di Indonesia* (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2013), h. 1.

² Evieta Fadjar, "Lansia-Indonesia-Makin-Bertambah", *Tempo Online*. 25 Juni 2013. <http://www.tempo.co/read/news/2013/06/25> (Akses 10 November 2020)

³ World Health Organization; *Populasi Lansia di Dunia Semakin Bertambah*, Situs Resmi VOA. <http://www.voaindonesia.com/content/who> (Akses 10 November 2020).



Undang RI. Nomor 13, Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut usia. Sementara program yang dijalankan pemerintah diantaranya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan lanjut usia.

Dalam realitasnya terjadi ledakan penduduk lanjut usia di satu sisi, dan pandangan masyarakat bahwa lanjut usia merupakan beban sosial di sisi lain, telah mengundang perhatian banyak pihak. Sebagaimana yang dikutip Prayitno, mengatakan bahwa banyak pakar yang memandang fenomena lanjut usia ini dari sisi yang serba muram, bahkan banyak pemerintah negara berkembang belum merasa siap dan cenderung mengabaikan kehadiran golongan tua ini.⁴

Keberadaan lanjut usia seringkali dipersepsikan secara negatif dan keliru, dimana lanjut usia dianggap sebagai beban keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Hal ini dimungkinkan karena melihat beberapa kasus lanjut usia yang hidupnya sangat tergantung kepada orang lain. Karena ketergantungan dan ketidakberdayaan lanjut usia ini kemudian disimpulkan sebagai beban dan menjadi alasan bagi keluarga tertentu untuk menitipkan mereka ke panti-panti jompo, bahkan diterlantarkan.⁵

Sebagai lansia (lanjut usia), mereka tetaplah merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang harus dilindungi oleh Negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 I ayat 2 yang isinya bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”. Kesejahteraan sosial merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Indonesia merupakan bagian dari negara kesejahteraan sehingga Negara wajib menasejahterakan warga negaranya tanpa terkecuali. Untuk mencapai kesejahteraan sosial maka diperlukan adanya suatu kebijakan sosial. Salah satu kebijakan sosial yang dibuat pemerintah adalah kebijakan perlindungan sosial kepada lansia.

⁴ Ibumajjah, “Hak Lanjut Usia Dalam Islam”, Website Ibumajjah. <https://ibnumajjah.wordpress.com/2012/09/26/hak-lanjut-usia-dalam-islam>

⁵ Bachtar, Wardi. 2006. Sosiologi Klasik Dari Comte Hingga Parsons. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan sosial adalah seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan (*vulnerability*) melalui perluasan pasar kerja yang efisien, pengurangan resiko-resiko kehidupan yang senantiasa mengancam manusia, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam melindungi dirinya dari berbagai bahaya dan gangguan yang dapat menyebabkan terganggunya atau hilangnya pendapatan.⁶

Perlindungan sosial ke dalam (lima) elemen, yaitu: pasar tenaga kerja, asuransi sosial; bantuan sosial, Perlindungan sosial lansia dalam Pasal 29 UU Nomor 13 Tahun 1998 bahwa Perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar. Perlindungan sosial lansia dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti.⁷

Dalam mengatasi fenomena lansia terlantar yang semakin hari jumlahnya semakin bertambah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melalui Dinas sosial Kabupaten Siak perlindungan sosial lansia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan Sosial Lansia pasal 9.

Diketahui bahwa kultur masyarakat Indonesia lazimnya masih percaya pada nilai-nilai tradisi tentang pola hubungan keluarga, dimana orangtua merupakan tanggung jawab anak. Namun dewasa ini ikatan tradisional keluarga mulai mengalami pergeseran, sehubungan dengan mudarnya pola hubungan antar generasi pada banyak masyarakat. Pergeseran pola hubungan antar generasi dikhawatirkan akan memojokkan golongan lanjut usia, suatu kecenderungan untuk tidak peduli pada keadaan atau melepas urusan merawat orang tua.

Banyaknya jumlah lansia bisa dimaknai sebagai keberhasilan pembangunan manusia dengan indikator bertambahnya usia harapan hidup Di sisi lain hal itu juga menghadirkan tantangan mengenai angka ketergantungan hidup yang akan berkorelasi dengan beban ekonomi yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk lanjut usia. Apalagi permasalahan lansia tidak hanya sebatas produktivitas tapi juga menyangkut hal lain seperti pendidikan dan

⁶ UU nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lansia.

⁷ Analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2006:246)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan. Namun hal itu bukan berarti para lansia tidak memiliki potensi untuk berkarya. Usia lanjut tetap memungkinkan seseorang untuk bekerja memperoleh penghasilan atau menghasilkan suatu barang dan jasa bagi orang lain.⁸

Fenomena yang menarik untuk dibahas dengan terjadinya peningkatan penduduk lanjut usia adalah pandangan bahwa lanjut usia bergantung pada penduduk yang lain terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sehingga para lanjut usia harus bekerja demi tidak bergantung kepada penduduk lainnya. Persediaan tenaga kerja dan angkatan kerja di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tuntutan kehidupan sosial ekonomi saat ini memaksa setiap orang untuk terus bekerja keras agar bertahan hidup, Tidak terkecuali di dalamnya terdapat peranan kaum lanjut usia. Para lansia aktif mencari kesempatan kerja yang ada untuk memenuhi kebutuhan akan hidup maupun meningkatkan taraf hidup serta meningkatkan status ekonomi keluarganya. Hal ini membuat para lansia menjadi produktif dan perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini.⁹

Setiap penduduk usia produktif harus menanggung semakin banyak penduduk usia lanjut. Masalah ekonomi yang dialami penduduk lanjut usia yaitu tentang pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan, rekreasi dan sosial. Kondisi fisik dan psikis yang menurun menyebabkan mereka kurang mampu menghasilkan pekerjaan dengan baik. Di sisi lain mereka dituntut untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin meningkat dari sebelumnya, seperti kebutuhan akan makanan bergizi seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin, perawatan bagi penderita penyakit penuaan dan kebutuhan rekreasi. Penghasilan yang diperoleh lansia antara lain dari pensiun, tabungan, dan bantuan keluarga. Jika lansia tidak memiliki aset dan tabungan yang cukup menjadikan pilihan untuk memperoleh pendapatan akan terbatas, maka lansia yang tidak bekerja berarti bantuan yang mereka dapatkan yaitu dari bantuan keluarga atau masyarakat bahkan pemerintah.

⁸ Arya, Wardhana, 2014. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.

⁹ Komnas Lansia, 2009. Pedoman Pelaksanaan Posyandu Lanjut Usia. Jakarta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor pendorong aktivitas lansia tersebut antara lain faktor ekonomi, faktor sosial, pendapatan, adanya pemuasan diri, adanya kesempatan kerja dan adanya kemandirian. Banyaknya lansia yang masih bekerja disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang relatif masih besar, serta secara fisik dan mental lansia tersebut masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Kebutuhan ekonomi yang relatif besar pada lansia kemungkinan disebabkan belum adanya jaminan sosial ekonomi yang memadai bagi lansia. Di Indonesia jaminan hari tua seperti uang pensiun masih terbatas hanya untuk mereka yang bekerja di sektor formal saja, tidak untuk sektor informal.

Oleh karena itu, perlu dipikirkan berbagai upaya untuk menjangkau lansia yang tidak punya pensiun atau jaminan hari tua mengingat jumlah lansia yang masih bekerja di sektor informal lebih banyak dibandingkan lansia dari sektor formal. Hal ini menjadi tantangan buat para lansia untuk lebih produktif tanpa menggantungkan hidup pada keluarga menatakan bahwa motivasi kerja ada dua yaitu faktor individual dan faktor organisasional. Faktor-faktor individual meliputi kebutuhan (*needs*), tujuan (*goals*), sikap (*attitude*) dan kemampuan (*abilities*). Sedangkan faktor-faktor organisasional meliputi pembayaran atau gaji (*pay*), keamanan pekerjaan (*jobsecurity*), sesama pekerja (*co-workers*), pengawasan (*supervision*), pujian (*praise*), dan pekerjaan itu sendiri (*job itself*).¹⁰

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Ketenagakerjaan, yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi, tenaga kerja merupakan semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja tanpa batasan umur tertentu. Tenaga kerja meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja,

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau membantu memperoleh nafkah paling sedikit satu jam secara terus-menerus selama seminggu yang lalu. Sementara yang dimaksud dengan mencari

¹⁰ Mandayati, 2012. Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Keikutsertaan Lansia dalam Posyandu Lansia. Jakarta: PT Bina Mahara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan. Penduduk yang mencari pekerjaan dibagi menjadi penduduk yang pernah bekerja dan penduduk yang belum pernah bekerja. Di Indonesia batasan umur minimal 15 tahun tanpa batasan umur maksimal. Pemilihan batasan umur 15 tahun berdasarkan kenyataan bahwa pada umur tersebut sudah banyak penduduk yang bekerja karena sulitnya ekonomi keluarga mereka. Indonesia tidak menganut batas umur maksimal karena Indonesia belum mempunyai jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan di hari tua yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan swasta. Untuk golongan inipun, pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh sebab itu, mereka yang telah mencapai usia pensiun biasanya tetap masih harus bekerja sehingga mereka masih digolongkan sebagai tenaga kerja.¹¹

Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, yang dimaksud dengan kesejahteraan umum yakni kesejahteraan semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Tidak hanya menjadi tujuan negara, kesejahteraan juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjaga dan memastikan rakyatnya dalam kondisi sejahtera. Sejahtera merujuk pada kondisi dimana seseorang berada dalam keadaan aman, sentosa dan makmur. Dengan demikian kesejahteraan akan tercapai apabila seseorang mendapatkan atau terpenuhi rasa keamanan, keselamatan, dan ketentramannya. Kesejahteraan umum pada dasarnya sama dengan kesejahteraan sosial, dimana kesejahteraan tersebut bertujuan mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok dan taraf hidup yang cukup. Dalam penyelenggaraannya, kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada umumnya dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 6 disebutkan penyelenggaraan 2 kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial semakin kompleks sehingga banyak ketidakterpenuhinya pelayanan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah

¹¹ Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Ketenagakerjaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada rakyatnya. Akibatnya masih banyak warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalankan kehidupan secara layak dan bermartabat. Sebagai contoh banyak lanjut usia terlantar yang menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang harus mendapat perhatian lebih dalam penanganannya. Sebagai warga negara, lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dibentuk sebagai pedoman untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, salah satu nya dengan melakukan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagai upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat rnewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.¹²

Di PT Kamparindo Agro Industri yang merupakan perusahaan industri yang bergerak pada bidang kelapa sawit yang berkembang saat ini, banyak sekali pekerja-pekerjanya yang sudah dikategorikan sebagai pekerja lanjut usia. Oleh karena itulah perlunya kita melihat perlindungan sosial terhadap pekerja lanjut usia tersebut.

Dalam pembahasan ini peneliti membahas tentang lansia potensial. Adapun hak-hak Lansia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang terdapat dalam Pasal 3: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Tidak Potensial meliputi:

- a. Pelayanan keagamaan dan mental spritual;
- b. Pelayanan kesehatan;
- c. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- d. Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- e. Perlindungan sosial.¹³

Dalam Pasal tersebut mengatur hak-hak lansia yaitu hak lansia untuk mendapat keadilan dalam menjalankan kehidupan. Kesejahteraan Sosial akan

¹² Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 6.

¹³ lihat pasal 3 ayat 2, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2004, Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan sosial Lanjut Usia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan dengan baik jika tidak ada masyarakatnya yang menderita atau terlantar. Apalagi jika dalam kondisi ini terjadi Penelantaran dalam kehidupan rumah tangga. Sesuai dengan pengertian Kesejahteraan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“Kesejahteraan Sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Sehubungan dengan maksud di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat lapangan serta mendeskripsikan data-data secara kualitatif. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah, “Peran Dinas Sosial Dalam Mengawasi Pekerja Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Di PT Kamparindo Agro Industri”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini di fokuskan kepada “Peran Dinas Sosial Dalam Mengawasi Pekerja Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Di PT Kamparindo Agro Industri”.

C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Mengawasi Pekerja Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Di PT Kamparindo Agro Industri dengan dua sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam Mengawasi Pekerja Lanjut Usia Potensial Di PT Kamparindo Agro Industri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia?
2. Apa faktor penghambat dalam upaya Mengawasi Pekerja Lanjut Usia Potensial Di PT Kamparindo Agro Industri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme “Peran Dinas Sosial Dalam Mengawasi Pekerja Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Di PT Kamparindo Agro Industri”.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya Peran Dinas Sosial Kabupaten Siak dalam Mengawasi Pekerja Lanjut Usia Potensial Di PT Kamparindo Agro Industri tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Manfaat teoritis
 - a. untuk menambah referensi bahan litelatur atau bahan pustaka khususnya memahami “Peran Dinas Sosial Dalam Mengawasi Pekerja Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Di PT Kamparindo Agro Industri”.
 - b. sebagai bahan pertimbangan masukan bagi penulis dari hasil penelitian ini dan juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut.
3. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam pembuatan Peraturan Bupati, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Siak dalam Mengawasi Pekerja Lanjut Usia Potensial di PT Kamparindo Agro Industri.



F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan.¹⁴ Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

2. Lokasi penelitian

Lokasi diadakan penelitian ini adalah di PT Kamparindo Agro Industri Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, dengan alasan dan pertimbangan mengambil lokasi ini, karena penulis melihat di PT Kamparindo Agro Industri Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tidak dilakukan perhatian terhadap pekerja lanjut usia oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak.

3. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier :

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian.¹⁵ Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁶

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.30.

¹⁶ *ibid*, h 31



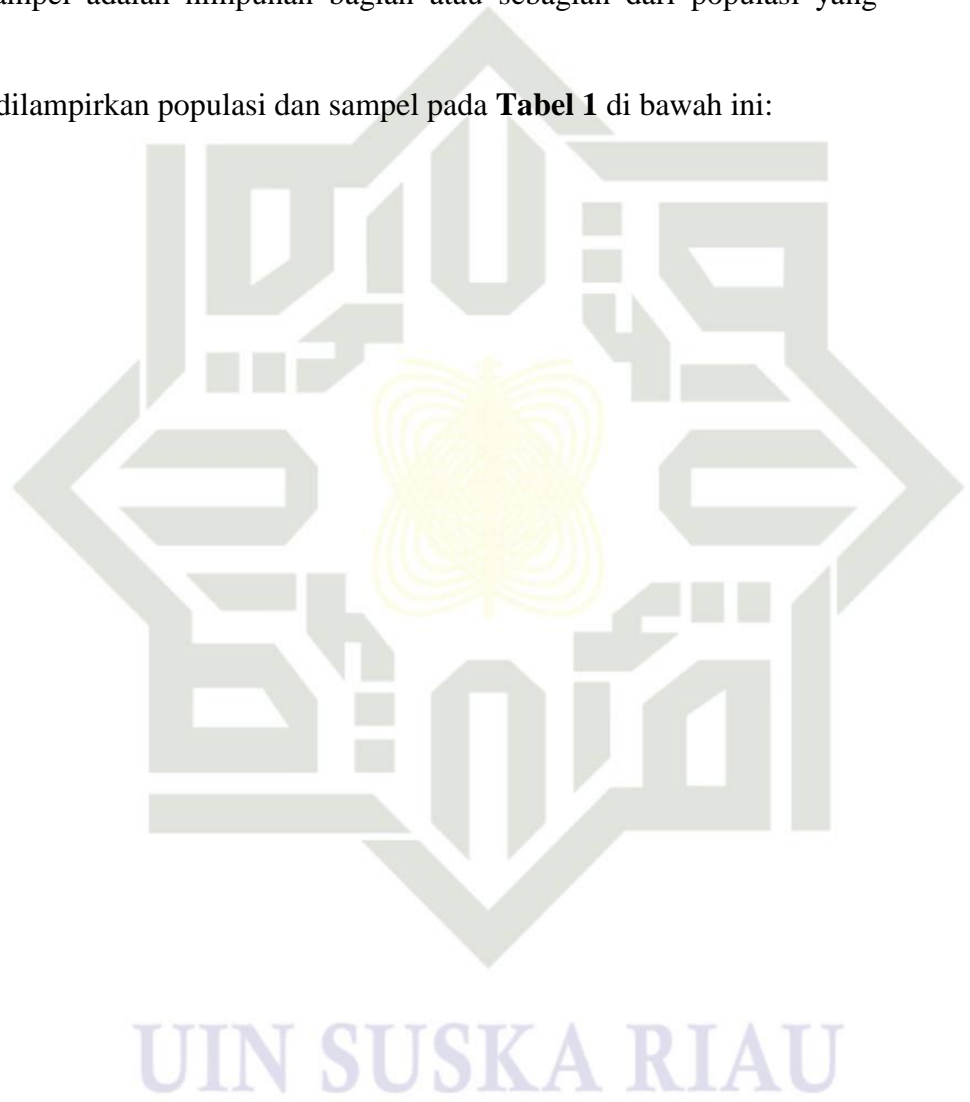
c. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus Hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama. Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang

ada¹⁷

Berikut dilampirkan populasi dan sampel pada **Tabel 1** di bawah ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.118

Tabel 1. Populasi dan Sampel

NO	POPULASI	RESPONDEN	SAMPEL	PERSENTASE
1	Kepala Dinas Sosial	1 orang	1 orang	100%
2	Maneger	1 orang	1 orang	100%
3	Kepala HRD	1 orang	1 orang	100%
4	Kepala KTU	1 orang	1 orang	100%
5	Kepala Administrasi (Keuangan, Personalia, Gudang)	4 orang	4 orang	100%
6	Laboratorium	2 orang	2 orang	100%
7	Buruh	10 orang	10 orang	100%
8	Jumlah	20 orang	20 orang	100%

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati,¹⁸ dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.

c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

6 Analisis data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang di peroleh, serta hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi untuk kemudian mendapatkan penjelasan mengenai Peran Dinas Sosial dalam Mengawasi Pekerja Lanjut Usia Di PT Kamparindo Agro Industri.

G Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub-bab, sehingga antara satu bab dengan yang bab lainnya merupakan suatu sistem dan

¹⁸ Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106.

¹⁹ Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki keterkaitan satu sama yang lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan uraian tentang: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORI

Pada bab ini akan di uraikan teori-teori tentang badan kepala dinas Kabupaten Siak dan gambaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia".

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan gambaran Lokasi Penelitian, Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Siak, Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Siak, Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Siak.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas hasil penelitian. meliputi pembahasan Peran Dinas Sosial Dalam Mengawasi Pekerja Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Di PT Kamparindo Agro Industri.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Pengertian Teori Peranan

Menurut Soerjono S. (1990 : 26), bahwa "Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial". Salbin T.R dan Allen V.E (dalam Miftah Thoha, 2005 : 263) menyatakan bahwa "Suatu peranan didefinisikan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal".²⁰

Selain itu, Soerjono Soekanto (2000 : 122) juga menyatakan bahwa "Peranan merupakan suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan- patokan prikelakuan". Patokan-patokan perilaku ini didasarkan pada peraturan peraturan yang berlaku di dalam masyarakat setempat dan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.

Peranan pemimpin juga didefinisikan oleh E. Winardi (2003 : 63) sebagai sesuatu yang mencakup kegiatan pemberian pengarahan dan koordinasi aktivitas-aktivitas pihak bawahannya. Hal tersebut mencakup kegiatan penempatan pegawai/karyawan (*Staffing*) hingga pemberian tugas-tugas.

Hasymi Ali (2002 : 431-432) mendefinisikan "Konsep peranan itu berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam kedudukan (Position) tertentu". Ia menggambarkan perilaku yang diharapkan daripadanya jika ia menduduki suatu jabatan, baik dalam sistem masyarakat maupun dalam sistem organisasi. Sesuai dengan pendapat tersebut Freemont E. Kast dan James E. Rosenzweig (Terjemahan Hasymi Ali, 2002 : 432), menegaskan bahwa "Peranan biasanya didefinisikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari setiap orang dalam kedudukan tertentu, siapapun dia. Perilaku ini tentu saja ditentukan (*Ordined*) oleh masyarakat. Jadi, peranan itu menentukan semacam limit atas tipe ekspresi kepribadian yang mungkin dalam situasi tertentu".

²⁰ Soerjono S. (1990 : 26), Salbin T.R dan Allen V.E (dalam Miftah Thoha, 2005 : 263)

²¹ Konsep peranan pekerja sosial Hasymi Ali (2002 : 431-432)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Rivai Z. (2004 : 148) yang menerangkan bahwa "Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu". Artinya, tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh Kepala Dinas Sosial (Kadisos) sebagai aparatur pelaksana penegak peraturan-peraturan dalam bidang sosial di daerah haruslah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun maksud dari defenisi-defenisi yang telah dikemukakan di atas, menyatakan bahwa Kepala Dinas Sosial (Kadisos) memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mengantisipasi permasalahan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Sosial memiliki peran yang sangat besar dalam menangani pekerja lanjut usia potensial yang timbul agar proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya

B. Teori Peranan Dinas Sosial

Sebagai satuan kerja perangkat 'daerah, Dinas Sosial Kabupaten Siak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah Daerah. Peran atau upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Siak antara lain:

- Melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Mengembangkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
- Memperluas ketahanan sosial masyarakat.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur yang berbasis kesejahteraan sosial.

Berdasarkan peran atau upaya-upaya tersebut dijabarkan kembali dalam bentuk-bentuk yang lebih spesifik, sebagai berikut:

- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui kegiatan:
 - Pembangunan Perumahan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
 - Pelatihan Keterampilan, Pembentukan dan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
 - Bantuan Perbaikan Perumahan lanjut usia / Tidak Layak Huni.



2. Program Pembinaan terhadap lanjut usia potensial maupun tidak potensial.
3. Program Pembinaan Panti Asuhan melalui Kegiatan Bantuan Tambahan Biaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial melalui Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penertiban, Pembinaan dan Bimbingan Gelandangan dan Pengemis.
 - b. Bantuan Pengadaan Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Sekolah Luar Biasa (SLB)
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo melalui kegiatan Pengadaan Prasarana Panti Asuhan.

Pengertian Teori Pekerja Sosial

Pekerja sosial adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/ organisasi sosial lainnya (Depsos, 2006: 7). Pekerja sosial didefinisikan sebagai orang yang memiliki kewenangan keahlian dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial (Wibawa, 2010: 52). Dengan mengacu pada perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin besar akan pelayanan sosial beserta perangkat keahliannya, dan seiring pula dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, maka peran pekerja sosial sebagai ahli bukan hanya pada tingkat pelayanan langsung (*direct social services*), melainkan harus sampai kepada tingkat kebijakan/ perundang-undangan dan perencanaan sosial. Dengan kata lain pekerja sosial bukan hanya ahli dalam menangani pnyandang masalah sosial, melainkan orang yang memiliki kekuatan (*strengths*) yang sesungguhnya bisa dijadikan sebagai “sumber” (*resource*) dalam proses pemecahan masalah atau pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tan dan Envall (2000: 5) : “ *The skillful social work professional is able to analyze complex situations and to facilitate individual,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*organizational, social and cultural changes. Social workers are the skilled deliverers of community resources to those who need them most.*²²

Seorang pekerja profesional yang terlatih mampu menganalisis situasi-situasi kompleks dan memfasilitasi perubahan-perubahan secara individual, organisasional, sosial dan kultural. Pekerja sosial adalah para pengelola/pemberi sumber-sumber kemasyarakatan yang telatih terhadap mereka yang sangat membutuhkan. Menurut Zatrow (dalam Suharto, 2010: 24) pekerja sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

Berdasarkan pengertian di atas maka seorang pekerja sosial harus bisa menciptakan kondisi masyarakat yang baik dan teratur dalam menjaga setiap keberfungsian elemennya yang menjadi para pemeran berbagai peran yang ada di dalam masyarakat. Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif dengan relasi-relasi yang ada di dalamnya untuk bisa memberikan ketertarikan diantara para pemegang peran tersebut.²³

D. Fungsi dan Tugas Pekerja Sosial

Pekerja sosial bertujuan untuk membantu seseorang meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tugas kehidupan, memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam berinteraksi dengan orang lain maupun sistem sumber dan mempengaruhi kebijakan yang ada, dengan demikian orang-orang tersebut dapat mencapai kesejahteraannya baik sebagai individu maupun kolektif. Menurut Hermawati (2001: 14) pekerja sosial melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Membantu orang untuk meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara lebih efektif untuk melaksanakan tugas kehidupan dalam memecahkan masalah

²² Dinas Sosial, 2014. Proses Pertolongan Dalam Pekerjaan Sosial Dengan Bencana dan Pengungsi. Jawa Barat: Balai Pelatihan Pekerja Sosial

²³ Dinas Sosial 2014 Pekerjaan Sosial. Jawa Barat: Balai Pelatihan Pekerja Sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengaitkan orang dengan sistem sumber, yaitu pekerja sosial memberikan informasi tentang sumber-sumber yang tersedia, hak-hak orang dengan sumber-sumber tersebut, serta prosedur yang diperlukan untuk memperolehnya
- c. Mempermudah interaksi, mengubah dan menciptakan hubungan baru antar orang dan sistem sumber kemasyarakatan
- d. Mempermudah interaksi, mengubah dan menciptakan relasi antar orang didalam lingkungan sistem sumber
- e. Memberikan sumbangan perubahan, perbaikan dan perkembangan kebijakan perundang-undangan sosial
- f. Meratakan sumber-sumber material, yaitu pekerja sosial memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang yang akan bertindak sebagai sistem sumber, dan bertindak sebagai pelaksana kontrol sosial.

Pekerja sosial berfungsi untuk membantu orang, memahami kondisi dan kenyataan yang dihadapi dengan cara meningkatkan kemampuan, mengaitkannya dengan cara sistem sumber dan mempengaruhi kebijakan sosial. Jadi, pekerja sosial bukan hanya meninjau suatu masalah sebagai masalah perorangan semata, melainkan juga mempertimbangkan situasi sosial di tempat orang itu berada dan terlibat, serta meningkatkan orang tersebut dengan sistem sumber dan kebijakan sosial, dengan demikian orang itu benar-benar dapat menjalankan tugas kehidupan dan fungsi sosialnya dengan baik, dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi, serta dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.

E. Peranan Pekerja Sosial

Pekerja sosial memiliki peran sentral dalam sistem pelayanan sosial. Sebagai sebuah profesi kemanusiaan, pekerja sosial memiliki seperangkat ilmu pengetahuan (*body of knowledge*), keterampilan (*body of skills*), dan nilai (*body of values*) yang diperolehnya melalui pendidikan formal dan pengalaman profesional. Ketiga kelompok tersebut membentuk pendekatan pekerjaan sosial dalam membantu kliennya.

Menurut Parsons, dkk (dalam Suharto, 2005:97), peranan pekerja sosial adalah sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sebagai Fasilitator

Berdasarkan literatur pekerjaan sosial, peranan fasilitator sering disebut sebagai pemungkin (*enabler*). Menurut Barker (dalam Suharto, 2005:98) menyatakan bahwa peranan fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional.

Fasilitator yaitu sebagai orang yang akan mempermudah dan meringankan jalan partisipan (Wibhawa, 2010: 105). Fasilitator bertujuan untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional/ transisional dengan cara menyediakan atau memberikan kesempatan dan fasilitas yang diperlukan klien untuk mengatasi masalahnya, memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan potensi klien yang dimilikinya.²⁴

b. Sebagai Perantara (*Broker*)

Peran sebagai perantara yaitu, menghubungkan individu, kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat. Peran perantara dalam proses pendampingan sosial, ada tiga prinsip utama dalam melakukan peranan sebagai broker yaitu: (a) mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat; (b) mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten; (c) mampu mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhankebutuhan penerima manfaat.

c. Sebagai *Mediator*

Peran sebagai mediator yaitu, memberikan layanan mediasi jika klien mengalami konflik dengan pihak lain atau orang lain agar dicapai kesesuaian antara tujuan dan kesejahteraan diantara kedua belah pihak. Menurut Galaway (dalam Suharto, 2010: 101) beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan peran mediator, yaitu :

²⁴ Depdiknas, 2003. Peran Program PLSP dalam Mengembangkan Potensi Masyarakat Menuju Kemandirian Bangsa. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Dan Pemuda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama,
- Mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik, dan
- Memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain.
- Sebagai pembela (*advocate*)

Peran pembela dalam praktek pekerjaan sosial dengan masyarakat, seringkali pekerja sosial harus berhadapan dengan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan serta sumber yang diperlukan oleh masyarakat atau dalam melaksanakan tujuan pengembangan masyarakat. Manakala pelayanan dan sumber sulit dijangkau oleh masyarakat, pekerja sosial harus memainkan peran sebagai pembela (*advocate*).

- Sebagai Pelindung (*protector*)

Pekerja sosial dalam melakukan peran sebagai pelindung (*guardian role*), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang beresiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: (a) kekuasaan, (b) pengaruh, (c) otoritas, dan (d) pengawasan sosial. Tugas-tugas peran pelindung meliputi: a) menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama; b) menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan, dan c) berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggung jawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial.

Pekerja sosial merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri. Dimana peranan seorang pekerja sosial sebagai agen perubah yang turut membantu dalam memecahkan persoalan yang dialami penyandang masalah kesejahteraan sosial salah satunya yaitu lansia terlantar.

F. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan atau sejahtera secara umum menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehat dan damai. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (dalam Wibhawa, 2010: 25) kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan yang sejahtera, baik secara fisik, mental maupun sosial dan tidak hanya perbaikan-perbaikan dari penyakit-penyakit sosial tertentu. Kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda meskipun substansinya tetap sama, kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi (Soeharto, 2005: 2), yaitu: ²⁵

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera Menurut Friedlander (dalam Sumarnonugroho, 1994: 31) menyatakan bahwa: *"Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well being in harmony with the needs of their families and the community."*

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisasi daripada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat. ²⁶

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 (dalam Sumarnonugroho, 1994: 33) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial ialah suatu

²⁵ Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama

²⁶ Rustanto, Bambang. 2013. *Kebijakan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia*. Online. [diakses pada 15 November 2020] tersedia di <http://bambang-rustanto.blogspot.com/2013/03/kebijakan-kesejahteraansosial-lanjut.html>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan.

G Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan kesejahteraan sosial yaitu untuk menjamin kebutuhan manusia, standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak, mendapatkan kesempatan-kesempatan dengan warga negara lainnya, peningkatan derajat harga diri setinggi mungkin, kebebasan berfikir dan melakukan kegiatan tanpa gangguan sesuai dengan hak-hak azasi seperti yang dimiliki sesamanya (Friendlander dalam Sumarnonugroho, 1994: 31). Sedangkan menurut Leonard Schneiderman (dalam Sumarnonugroho, 1994: 37) menguraikan tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yakni *system maintenance*, *system control*, dan *system change*.²⁷

1 System Maintenance

Tujuan ini mencakup pemeliharaan dan menjaga kesinambungan atau kelangsungan keberadaan serta tatanan nilai-nilai sosial, dalam hal ini berhubungan dengan:

- Pengertian dasar tentang arti dan tujuan kehidupan
- Motivasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup individu dan kelompok
- Norma-norma untuk menampilkan peranan berdasarkan umur dan jenis kelamin
- Norma-norma yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang serta pelayanan
- Norma-norma tentang pemecahan konflik dan semacamnya

²⁷ Sumarnonugroho, 1994. Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta: PT. Hanindita

2. *System Control*

Tujuannya untuk mengadakan kontrol secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial yang ada. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan :

- Intensifikasi fungsi-fungsi pemeliharaan yang berupa kompensasi, resosialisasi dan kesadaran terhadap kelompok-kelompok penduduk yang berperilaku menyimpang agar dapat mengembangkan pengawasan diri
- Menggunakan prosedur-prosedur hukum dan peraturan-peraturan untuk meningkatkan pengawasan eksternal dari perilaku yang menyimpang, seperti kerusakan dan kemunduran mental.

3. *System Change*

Tujuan sistem ini adalah mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam hal ini usaha sistem kesejahteraan sosial merupakan suatu alat (instrument) untuk menghilangkan hambatan-hambatan terhadap terwujudnya: (a) partisipasi dalam pengambilan keputusan (*decision making*) secara penuh dan lebih adil; (b) distribusi sumber-sumber yang lebih adil dan merata dan; (c) penggunaan kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam struktur sistem secara lebih banyak dan adil.

Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial berfungsi sebagai reorganisasi dari adanya disorganisasi. Fungsi lain dari kesejahteraan sosial adalah memberikan atau mengembalikan fungsionalitas dan peranan-peranan sosial dari suatu sistem yang telah mengalami gangguan atau kerusakan akibat adanya perubahan, baik pada tingkat sistem kepribadian maupun sistem sosial. Fungsi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

a. Fungsi penyembuhan dan pemulihan

Bertujuan untuk meniadakan hambatan-hambatan atau masalah sosial yang ada. Fungsi pemulihan (*rehabilitative*) bertujuan untuk menanamkan dan menumbuhkan fungsionalitas kembali dalam diri orang maupun anggota masyarakat. sedangkan fungsi penyembuhan dapat bersifat represif artinya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat menekan agar masalah sosial yang timbul tidak makin parah dan menjalar.

b. Fungsi pencegahan (*preventif*)

Bertujuan untuk mencegah agar jangan sampai timbul masalah sosial yang baru, selain itu juga untuk memelihara *fungsionalitas* seseorang maupun masyarakat

c. Fungsi pengembangan (*developmental*)

Untuk mengembangkan kemampuan orang maupun masyarakat agar dapat lebih meningkatkan fungsionalitas mereka sehingga dapat hidup secara produktif.

d. Fungsi penunjang (*suportif*)

Fungsi ini menopang usaha-usaha lain agar dapat lebih berkembang. Meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat memperlancar keberhasilan program-program lainnya, seperti bidang kesehatan, pendidikan dan keterampilan.

I. Pengertian Lanjut Usia

Lanjut Usia adalah kelompok orang yang sedang mengalami suatu proses perubahan yang bertahap dalam jangka waktu beberapa dekade. Menurut World Health Organisation (WHO) atau organisasi kesehatan dunia (dalam Notoatmodjo, 2007: 279) dikatakan lanjut usia tergantung dari konteks kebutuhan yang tidak diislah-pisahkan. Konteks kebutuhan tersebut dihubungkan secara biologis, sosial dan ekonomi dan dikatakan lanjut usia dimulai paling tidak saat masa puber dan prosesnya berlangsung sampai kehidupan dewasa.²⁸

Batasan penduduk lansia dapat dilihat dari aspek-aspek biologi, ekonomi, sosial dan usia atau batasan usia, yaitu :

- a. Aspek biologis Penduduk lansia ditinjau dari aspek biologis adalah penduduk yang telah menjalani proses penuaan, dalam arti menurunnya daya tahan fisik yang ditandai dengan semakin rentannya tubuh terhadap serangan berbagai penyakit yang dapat
- b. Aspek ekonomi Aspek ekonomi menjelaskan bahwa penduduk lansia dipandang lebih sebagai beban daripada potensi sumberdaya bagi

²⁸ Syam'ani. 2013. There would be a lot of changes as stressor that potentially could make self concept changes: low self esteem to the elderly. Psychiatric Nursing Journal volume 1, No.1 60-69 (diakses 10 November 2020).

pembangunan. Warga tua dianggap sebagai warga yang tidak produktif dan hidupnya perlu ditopang oleh generasi yang lebih muda. Bagi penduduk lansia yang masih memasuki lapangan pekerjaan, produktivitasnya sudah menurun dan pendapatannya lebih rendah dibandingkan pekerja usia produktif. akan tetapi tidak semua penduduk yang termasuk dalam kelompok umur lansia ini tidak memiliki kualitas dan produktivitas rendah.

c. Aspek sosial dilihat dari sudut pandang sosial, penduduk lansia merupakan kelompok sosial tersendiri. Di negara barat, penduduk lansia menduduki strata sosial di bawah kaum muda. Di masyarakat tradisional di Asia seperti Indonesia penduduk lansia menduduki kelas sosial yang harus dihormati oleh masyarakat yang usianya lebih muda.

d. Aspek umur berdasarkan ketiga aspek di atas. Pendekatan umur atau usia adalah yang paling memungkinkan untuk mendefinisikan penduduk usia lanjut. Batasan usia lanjut didasarkan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 adalah 60 (enam puluh) tahun. Namun berdasarkan pendapat beberapa ahli dalam program kesehatan lanjut usia, Departemen Kesehatan mengelompokkan menjadi 4 (empat) antara lain:

1. Kelompok Pertengahan Umur Yaitu usia 45-54 tahun, dimana kelompok usia ini tergolong dalam masa verilitas, yaitu masa persiapan usia lanjut yang menampakkan keperkasaan fisik dan kematangan jiwa.
2. Kelompok Usia Lanjut Dini Yaitu usia 55-64 tahun, dimana kelompok usia ini tergolong kedalam masa prasenium, yaitu kelompok yang mulai memasuki usia lanjut
3. Kelompok Usia Lanjut Kelompok dalam masa senium yaitu usia 60 (enam puluh) tahun keatas
4. Kelompok Usia Lanjut dengan Resiko Tinggi Kelompok yang berusia lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun atau kelompok usia lanjut yang hidup sendiri, terpencil, menderita penyakit berat dan cacat.

Sedangkan menurut Departemen Kesehatan R.I (dalam Maryam, 2012: 33) lanjut usia tergolong dalam lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial. (1) Lanjut usia potensial, yaitu lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa, (2) lanjut usia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak potensial, yaitu lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Sedangkan menurut Hawari, (dalam Effendi, 2009: 243) lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Kegagalan ini berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual.

Dilihat dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mengalami penurunan fungsi tubuh baik dari segi fisik, mental maupun sosial sehingga membutuhkan bantuan orang lain dalam meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang mandiri dan dihargai oleh orang lain maupun masyarakat.

Karakteristik Lanjut Usia

Dalam rentang kehidupan seseorang, lanjut usia ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis tertentu. Efek-efek tersebut menentukan, sampai sejauh tertentu apakah pria/ wanita usia lanjut akan melakukan penyesuaian diri secara baik atau buruk. Akan tetapi, ciri-ciri usia lanjut cenderung menuju dan membawa penyesuaian yang buruk dari pada yang baik dan kepada kesengsaraan daripada kebahagiaan. Menurut Hurlock (1980: 380-385) lanjut usia (lansia) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Lanjut usia merupakan periode kemunduran Perkembangan seseorang tidak pernah bersifat statis, ia selalu berubah secara konstan artinya bahwa seseorang selalu menuju pada kedewasaan. Sebaliknya, pada bagian selanjutnya mereka tidak evolusional lagi perubahan ini sesuai dengan kodrat manusia. Periode usia lanjut, ketika kemunduran fisik dan mental terjadi secara perlahan dan bertahap dikenal dengan istilah senescence, yaitu masa proses menjadi tua.
- b. Perbedaan individual pada efek menua Dewasa ini menua, itu mempengaruhi orang-orang secara berbeda. Orang menjadi tua secara berbeda karena mereka memiliki sifat pembawaan yang berbeda, sosio ekonomi dan latar pendidikan yang berbeda, dan pola hidup yang berbeda sebagai contoh beberapa orang berfikir bahwa masa pensiun itu merupakan berkah dan keberuntungan, sedangkan orang lain menganggapnya sebagai kutukan.

- c. Orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas Lansia memiliki status kelompok minoritas karena sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan terhadap orang lanjut usia dan diperkuat oleh pendapat-pendapat klise yang jelek terhadap lansia. Pendapat-pendapat klise itu seperti: lansia lebih senang mempertahankan pendapatnya daripada mendengarkan pendapat orang lain.
- d. Menua membutuhkan perubahan peran Menua membutuhkan perubahan peran, perubahan peran tersebut dilakukan karena lansia mulai mengalami kemunduran dalam segala hal. Perubahan peran pada lansia sebaliknya dilakukan atas dasar keinginan sendiri bukan atas dasar tekanan dari lingkungan. Meskipun pada kenyataannya pengurangan dan perubahan peran banyak terjadi karena tekanan sosial.
- e. Penyesuaian yang buruk terhadap lansia Perlakuan yang buruk terhadap orang lanjut usia membuat lansia cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk. Lanjut usia lebih memperlihatkan bentuk 36 perilaku yang buruk, karena perlakuan yang buruk itu membuat penyesuaian diri lansia menjadi buruk.

Kebutuhan Lanjut Usia (Lansia)

Menurut Darmojo (dalam Maryam, 2012: 158) kebutuhan lanjut usia, meliputi: makanan cukup dan sehat, pakaian dan kelengkapannya, perumahan/ tempat tinggal/ tempat berteduh, perawatan dan pengawasan kesehatan, bantuan teknis praktis sehari-hari/ bantuan hukum, rekreasi dan hiburan sehat lainnya, rasa aman dan tenteram serta kesinambungan bantuan dana dan fasilitas.²⁹

Lanjut usia sebagai manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan sebagaimana umumnya, yaitu kebutuhan makanan, perlindungan, perawatan kesehatan dan kebutuhan sosial dalam mengadakan hubungan dengan orang lain (Loneloh, 1994: 190). Kebutuhan utama lanjut usia antara lain meliputi:

- a. Kebutuhan fisik (physiological needs) adalah kebutuhan fisik atau biologis seperti pangan, sandang, papan dan sebagainya.
- b. Kebutuhan ekonomi

²⁹ Unit Pelaksana Teknis Panti Wredha, 2002. Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Sosial Panti Wredha. Semarang: Dinas Kesejahteraan Sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kebutuhan kesehatan, berupa kesehatan fisik, mental dan keamanan
- d. Kebutuhan psikologis, meliputi kasih sayang, ketenteraman, adanya tanggapan dari orang lain serta status yang jelas
- e. Kebutuhan sosial (*social needs*) yaitu berupa peranan-peranan dalam hubungan dengan orang lain, hubungan antar pribadi dalam keluarga, teman-teman sebaya dan hubungan dengan organisasi-organisasi sosial.

Selain kebutuhan primer lanjut usia juga membutuhkan kebutuhan-kebutuhan sekunder atau kebutuhan kedua yaitu kebutuhan dalam melakukan aktivitas, kebutuhan dalam pengisian waktu luang dan rekreasi, kebutuhan yang bersifat politis yaitu meliputi status perlindungan hukum, partisipasi dan kebutuhan yang bersifat keagamaan/ spiritual seperti memahami akan makna kehadiran dirinya di dunia ini dan memahami akan hal-hal yang tidak diketahui diluar kehidupan seperti kematian. Ini diperkuat oleh Syam'ani (2013) dalam *Psychiatric Nursing Journal volume 1, No.1 60-69* “ *That the spirituality aspect of the elderly is worthy and most be develop to help the elderly to cope with changes in old age, so the elderly can build a positive self concept to reach optimum aging*” (Bahwa aspek spiritual pada lansia merupakan hal yang berharga dan harus dikembangkan agar dapat membantu lansia dalam membangun coping yang adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masa tua sehingga lansia dapat mengembangkan konsep diri yang positif serta menjalani masa tua dengan bahagia dan sejahtera).³⁰

Perda Kabupaten Siak Tentang Penanggulangan Pekerja Lanjut Usia Potensial

Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Siak merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memecahkan masalah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan wajib sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

³⁰ Tim redaksi, 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa Edisi Ke 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah memberikan kewenangan otonomi kepada setiap daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam undang-undang ini, daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan sesuai dengan standar, norma dan kebijakan Pemerintah kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama. Daerah juga mendapat kewenangan untuk menyelenggarakan perizinan usaha baik bagi investor dalam negeri maupun investor asing serta dapat pula melakukan pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, koperasi, dan tenaga kerja dengan tujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan peran serta masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan tersebut dibiayai dan atas beban APBD. Hal ini berarti bahwa setiap daerah Kabupaten dan kota harus mampu menggali sumber keuangan sendiri secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, yang didukung oleh perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Di lain pihak, seluruh lapisan masyarakat yang ada di daerah berharap kondisi kehidupan mereka menjadi lebih baik, seiring dengan diberlakukannya Undang-undang yang mengatur tentang Otonomi Daerah. Oleh karena itu setiap penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan daerah harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, karena pada dasarnya pembangunan dilaksanakan dari, oleh dan untuk seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Dengan kata lain bahwa masyarakat harus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberdayakan melalui peran aktifnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pembangunan di daerah.³¹

Bagi Kabupaten Siak sebagai Kabupaten yang baru selain menghadapi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tersebut, maka permasalahan obyektif dalam mengagendakan program dan kegiatan pembangunan daerah adalah kondisi geografis dan keadaan alam yang spesifik, yang belum seluruhnya tersentuh oleh kegiatan pembangunan masa sebelumnya.



UIN SUSKA RIAU

³¹ Undang-Undang No. 32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah. 2007. Visi Media: Jakarta.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Siak

Kabupaten Siak merupakan daerah beriklim tropis basah yang relatif tinggi dan rata-rata curah hujan mencapai 991/tahun. Suhu setiap bulan antara 27.5°C dengan kelembaban 88.9% dan rata-rata sinar matahari 44.4%.

Kabupaten ini meliputi wilayah seluas 8.233,57 Km² dengan pusat administrasi di Kota Siak Sri Indrapura. Daerah ini berada pada posisi 1°16' 30" LU dan 100°54' 21" - 102°54' 2" - 102°10' 59" BT dengan batas-batas wilayah:

Utara : Kabupaten Bengkalis

Selatan: Kabupaten Kampar dan Pelalawan

Barat : Kota Pekanbaru.

Timur : Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan.³²

Kabupaten Siak memiliki potensi yang sangat strategis mengingat daerahnya berada di wilayah Segi Tiga pertumbuhan Ekonomi "SIJORI" Singapura Johor Riau dan IMG-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle). Dengan jarak hanya 150 km dari Singapura, Siak diuntungkan sebagai persinggahan alternatif bagi kapal pedagang di Selat Malaka dan bahkan berpotensi besar menjadi lokasi industri dan layanan perdagangan internasional. Dibidang administrasi pemerintahan, Kabupaten Siak dibagi ke dalam 13 kecamatan dan 15 desa/kelurahan.

BPS Provinsi Riau mencatat bahwa penduduk Kabupaten Siak tahun 2006 berjumlah 302.182 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 36,70 jiwa/Km. Berkaitan dengan potensi tenaga kerja, survei nasional tentang sosial ekonomi mengungkapkan bahwa angkatan kerja usia 15-64 tahun berjumlah 174.184 jiwa atau 62.22% dari jumlah penduduk dengan penyerapan tenaga kerja lokal rata-rata 14.88%.³³

³² Arsip Humas Kabupaten Siak, 2015

³³ <http://siakkab.go.id/sejarah-siak/> di akses pada tanggal 21 November 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semenjak menjadi daerah otonomi baru, Kabupaten Siak dengan aktif meningkatkan infrastruktur dan fasilitasnya. Fasilitas/ infrastruktur yang telah tersedia di daerah ini meliputi transportasi darat (kondisi jalan baik/ bus dan mini bus), transportasi air (pelabuhan, ferry cepat dan kapal motor), jasa telekomunikasi (telepon, telepon selular dan internet), Perbankan (Nasional dan Bank Lokal).

Disamping itu telah ada pula fasilitas penting lain seperti Pusat Pelayanan Kesehatan, Sekolah (Negeri/ Swasta) dan perkantoran Militer dan Kepolisian. Maka dari itu untuk lebih memajukan Kabupaten Siak maka pemerintah kabupaten bersama jajarannya bekerja sama di dalam menjalankan roda pemerintahannya maka Kabupaten Siak membuat visi dan misi nya.³⁴

B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Siak

Dinas Sosial Kabupaten Siak sebagai lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak Kabupaten Siak serta berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Siak. Dinas Sosial Kabupaten Siak dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 3 (tiga) Bidang terdiri dari 7 (tujuh) Seksi termasuk didalamnya Jabatan Fungsional. Selain itu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibantu oleh Tenaga Pekerja Sosial antara lain : TKSK, Pendamping PKH, Satuan Bakti Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, Tagana, dll.

Guna menjalankan tugas dan fungsi di Bidang Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Siak melayani seluruh permasalahan sosial guna membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah. Selain sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, Kabupaten Siak juga merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang didanai oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat melalui DIPA yang ada di Pemerintah Provinsi Riau.

³⁴<https://web.siakkab.go.id/tag/otonomi-daerah>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Siak

Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana sebuah instansi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi juga adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi tersebut. Sedangkan visi dalam kebijakan pembangunan merupakan suatu kondisi yang dicita-citakan sekaligus sebagai arahan untuk mencapai sesuatu yang dicitacitakan. Visi pembangunan Sosial di Kabupaten Siak pada hakekatnya merupakan turunan dari Visi Besar (Grand Vision) pembangunan Kabupaten Siak. Oleh karena itu, dalam penyusunan Visi Dinas Sosial Kabupaten Siak tetap mengacu pada Visi Pembangunan Daerah Siak yaitu: ” *Terwujudnya Kabupaten Siak yang maju dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu serta menjadi tujuan pariwisata di Sumatera.* ”

Misi

Misi, pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak dirumuskan sebagai berikut:

- Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Beriman dan Bertaqwa serta Berbudaya Melayu.
- Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan.
- Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.
- Mewujudkan Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing.
- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Serta Pelayanan Publik Yang Prima

Sebagai SKPD yang mengurus bidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Siak dalam 5 tahun kedepan (2016-2021) akan mendukung misi Pemerintah Kabupaten Siak, yaitu misi ketiga. ” ***Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing***”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Dinas Sosial Kabupaten Siak untuk periode 2016-2021 adalah : "**Meningkatkan Taraf Kesejahteraan, Kualitas, dan Kelangsungan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**".

Sasaran

Sasaran Strategis Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang ingin dicapai Dinas Sosial Kabupaten Siak periode 2016-2021 adalah :

- a. Meningkatnya Kemampuan lanjut usia Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasarnya Secara Mandiri;
- b. Pulih dan Berkembangnya Kemampuan Orang Yang Mengalami Disfungsi Sosial Untuk Dapat Melaksanakan Fungsi Sosial Secara Wajar;
- c. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Individu/Keluarga/Kelompok Lanjut Usia dan yang Mengalami Guncangan dan Kerentanan Sosial.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Siak

Dinas Sosial Kabupaten Siak sebagai lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak Kabupaten Siak serta berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Siak. Dinas Sosial Kabupaten Siak dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 3 (tiga) Bidang terdiri dari 7 (tujuh) Seksi termasuk didalamnya Jabatan Fungsional. Selain itu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibantu oleh Tenaga Pekerja Sosial antara lain : TKSK, Pendamping PKH, Satuan Bakti Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, Tagana, dll.³⁵

Guna menjalankan tugas dan fungsi di Bidang Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Siak melayani seluruh permasalahan sosial guna membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah. Selain sebagai

³⁵ Rivai, Veithzal, 2003, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Edisi Kedua), PT.Rajagrafindo Persada : Jakarta.



perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, Kabupaten Siak juga merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang didanai oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat melalui DIPA yang ada di Pemerintah Provinsi Riau.³⁶

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial; dan
 2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
 1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas; dan
 2. Seksi Pemberdayaan, Bantuan Stimulan Dan Restorasi Sosial.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

³⁶ Peraturan Pemerintah RI Tahun 2011 Tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS).



5. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi :

(1) Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan sosial yang meliputi perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

(2) Kepala Dinas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- c. penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- f. pelaksanaan urusan administrasi Dinas Sosial;
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama antar daerah di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. pengkoordinasian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan sosial di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- j. pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial;
- k. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia Dinas Sosial; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan Dinas Sosial, pembinaan kepegawaian, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial, pengelolaan data terpadu dan informasi, penatalaksanaan rumah tangga organisasi, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan rancangan kebijakan dinas;
- b. pengoordinasian kegiatan di lingkup Dinas Sosial yang meliputi pengumpulan dan pengelolaan data terpadu, verifikasi bantuan sosial, serta penanganan kedaruratan sosial;
- c. penyiapan bahan penyusunan program/kegiatan, dan anggaran;
- d. penyiapan bahan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria sebagai pedoman kerja pelaksanaan tugas;
- e. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan standar operasional prosedur bidang Sekretariat;
- f. pembinaan kepegawaian dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. pengoordinasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Sosial;
- h. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran;
- pengoordinasian penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;
- penataan organisasi, serta pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran;

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang perlindungan dan jaminan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat disabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan.
- penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
- penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan standar operasional prosedur bidang perlindungan dan jaminan sosial kepada seseorang, keluarga,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;

d. pelaksanaan program dan kegiatan teknis dibidang perlindungan dan jaminan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;

e. pelaksanaan koordinasi, identifikasi dan fasilitasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil, atau rentan serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;³⁷

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi Sosial di luar panti. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

³⁷<https://bappeda.humas dan protokol siakkab.go.id/>

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial di luar panti yang meliputi anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, orang terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, kelompok minoritas, gelandangan, pengemis, eks narapidana, eks psikotik, korban penyalahgunaan napza, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS), korban tindak kekerasan, dan korban perdagangan orang;.
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Rehabilitasi Sosial;
- d. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan standar operasional prosedur di bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. pengelolaan data di bidang Rehabilitasi Sosial;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Rehabilitasi Sosial;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial;
- h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial;

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan kebijakan, program/kegiatan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti yang meliputi anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, serta lanjut usia potensial dan tidak potensial;
- b. melakukan pelaksanaan kebijakan, program/kegiatan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- f. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- g. melakukan penyediaan dan pengolahan data penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia; dan
- h. melakukan pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada maksud ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang meliputi pemberdayaan perorangan, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat yang tergolong miskin dan/atau fakir miskin, komunitas adat terpencil, pembinaan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, restorasi sosial, dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, serta pemberdayaan masyarakat baik perorangan dan/atau kelompok sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial, dan penataan lingkungan sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- d. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan standar operasional prosedur bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. pengelolaan data di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;.
- h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, sesuai dengan yang dijabarkan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Peran atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak dalam mengawasi pekerja lanjut usia potensial yang timbul, dari beberapa program kerja dan kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Bantuan pembangunan perumahan komunitas adat terpencil (KAT)
 - Bantuan perbaikan perumahan fakir miskin/rumah tidak layak huni.
 - Pembinaan dan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE).
- b. Program pembinaan panti asuhan.
- c. Program pembinaan anak terlantar.

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis menganalisa bahwa spesifikasi dari upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam mengawasi pekerja lanjut usia potensial yaitu melalui program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan cara memberikan pembinaan dan bantuan modal terhadap kelompok-kelompok usaha sesuai dengan bidang usaha yang diberikan oleh Dinas Sosial tersebut terhadap kelompok usaha yang dibuat oleh masyarakat di Kecamatan Kandis tersebut.

Dari berbagai upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial tersebut, Dinas Sosial dapat dikategorikan sudah “berperan” akan tetapi, peran yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam mengawasi pekerja lanjut usia potensial masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum dilaksanakan secara merata pada semua Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Siak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Adapun yang menjadi kendala peran atau upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial, antara lain:

- a. Tingkat keseriusan masyarakat dalam memberdayakan kelompok atau komunitasnya yang masih rendah. Contoh: pemberian dana bantuan yang di berikan oleh Dinas Sosial tidak digunakan sebagaimana semestinya.
- b. Lokasi yang cukup jauh dan sulit untuk ditempuh dalam rangka melakukan pengamatan (pengawasan) secara langsung terhadap kelompok atau komunitas yang akan diberdayakan.
- c. Tidak adanya sistem pelaporan dan pertanggung jawaban dari kelompok masyarakat atau komunitas yang telah dibantu dan diberdayakan oleh Dinas Sosial, sehingga bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial hanya bersifat memberikan bantuan tanpa adanya usaha untuk meningkatkan komunitas tersebut agar benar-benar menjalankan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan kesejahteraan kelompoknya. Dengan kata lain, pemberian bantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial hanya bersifat penyaluran bantuan tanpa adanya pertanggung jawaban secara tertulis atau bukti pelaksanaan program kegiatan dari kelompok usaha yang mendapatkan bantuan pemberdayaan tersebut, sehingga dana bantuan yang diberikan tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan semula.
- d. Kurangnya pemerataan pemberian bantuan ke masing-masing kelompok usaha pada tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Siak.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, sesuai dengan yang dijabarkan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

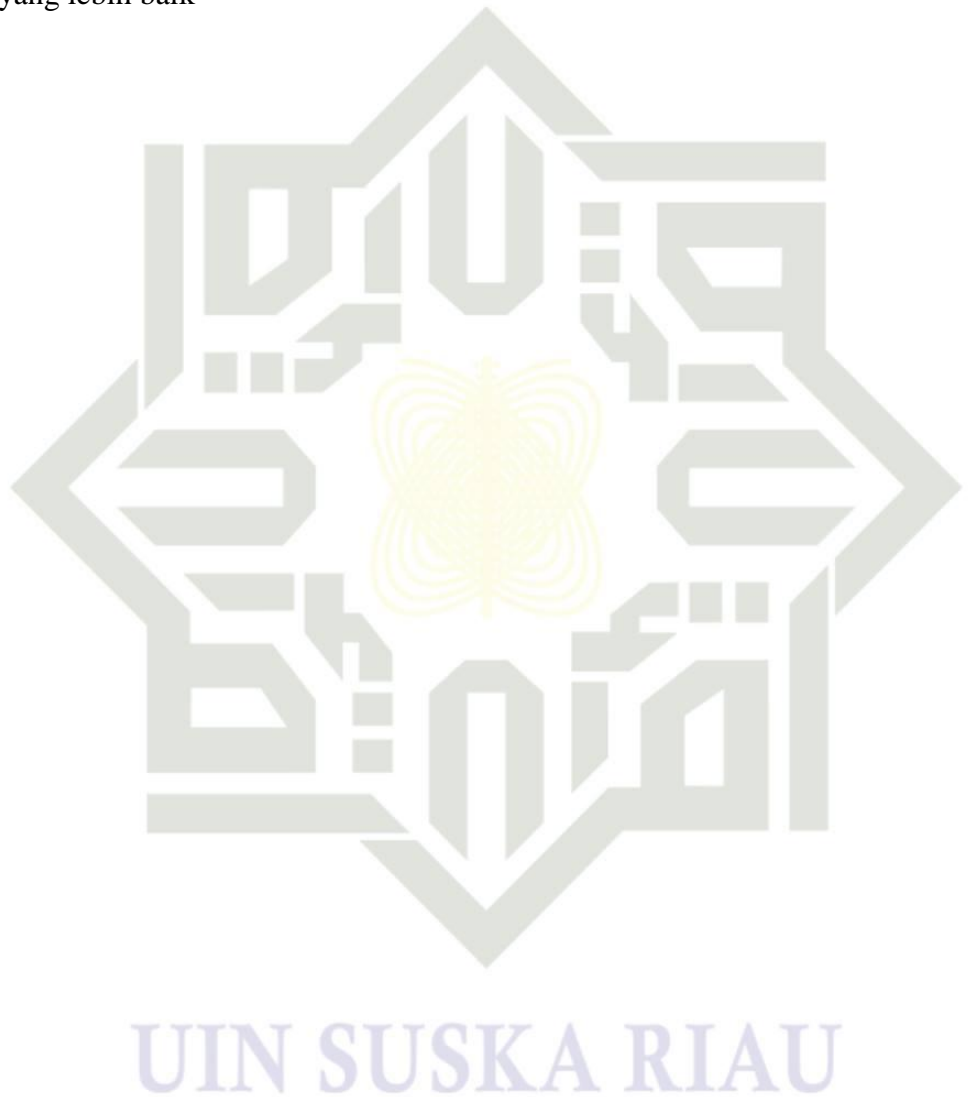
1. Kepada lanjut usia, hendaknya tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Semangat kerja yang tinggi serta kepuasan batin yang didapatkan sebaiknya harus diseimbangkan dengan upaya-upaya agar tetap produktif dalam bekerja.
2. Kepada keluarga lanjut usia, hendaknya selalu meningkatkan perhatian terhadap kondisi kesehatan lanjut usia pada saat bekerja, serta tidak

mengurangi tanggung jawab dalam memberi fasilitas serta modal dalam bekerja juga.

3. Kepada instansi dinas terkait, diharapkan agar lanjut usia dapat diberi kemudahan dalam bekerja seperti memberikan modal bagi kelangsungan usaha mereka dan peluang kerja di sektor informal, karena lanjut usia masih punya kemauan yang keras bila ada kesempatan untuk bekerja dengan pekerjaan yang lebih baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.30.
- Arya, Wardhana. 2014. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Bachtiar, Wardi. 2006. *Sosiologi Klasik Dari Comte Hingga Parsons*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Bambang, Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.118
- Depdiknas. 2003. *Peran Program PLSP dalam Mengembangkan Potensi Masyarakat Menuju Kemandirian Bangsa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Dan Pemuda
- Dinas Sosial. 2014. *Pekerjaan Sosial*. Jawa Barat: Balai Pelatihan Pekerja Sosial
- Dinas Sosial. 2014. *Proses Pertolongan Dalam Pekerjaan Sosial Dengan Bencana dan Pengungsi*. Jawa Barat: Balai Pelatihan Pekerja Sosial
- Evieta, Fadjar. "Lansia-Indonesia-Makin-Bertambah", Tempo Online. 25 Juni 2013. <http://www.tempo.co/read/news/2013/06/25> (Akses 10 November 2020)
- Hajar. M. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, h.53
- Haris, Herdiansyah, 2010. *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, h.106.
- Komnas Lansia. 2009. *Pedoman Pelaksanaan Posyandu Lanjut Usia*. Jakarta.
- Mandayati. 2012. *Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Keikutsertaan Lansia dalam Posyandu Lansia*. Jakarta: PT Bina Mahara.
- Ryvai, Veithzal. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Edisi Kedua)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rustanto, Bambang. 2013. *Kebijakan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia*. Online. [diakses pada 15 November 2020] tersedia di <http://bambang-rustanto.blogspot.com/2020/11/kebijakan-kesejahteraansosial-lanjut.html>.
- Suparinah,dkk. 2002. *Jurnal Perempuan Lansia*. Jakarta: SMKG Desa Putera.
- SM, Lumbantobing. 2011. *Kecerdasan Pada Lanjut Usia*. Jakarta: FKUI Press.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Soerjono S. (1990 : 26), Salbin T.R dan Allen V.E (dalam Miftah Thoha, 2005 : 263)
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, h.52
- Suardiman, Siti Partini. 2011. *Psikologi Lanjut Usia*. Yogyakarta: UGM Press..
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama
- Sumarnonugroho. 1994. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: PT Hanindita
- Taufik, Abdullah. 1979. *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Tim Redaksi. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa Edisi Ke 4*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Weber, Max. 2006. *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme*. Terjemahan T.W.Utomo. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- William J, Goode. 2007. *Sosiologi Keluarga Terjemahan Lailahanaoum Hasyim*. Jakarta: Bumi Aksara..

A JURNAL ILMIAH

- Analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2006:246)
- Konsep peranan pekerja sosial Hasymi Ali (2002 : 431-432)
- Sam'ani. 2013. *There would be a lot of changes as stressor that potentially could make self concept changes: low self esteem to the elderly*. Psychiatric Nursing Journal volume 1, No.1 60-69 (diakses hari Minggu, 9 Maret 2014, pukul 08.00 wib).

B PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Asip Humas Kabupaten Siak, 2015
- Ibid, h 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lihat Kementerian Kesehatan RI, Gambaran Kesehatan Lanjut Usia di Indonesia (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2013), h. 1.
Peraturan Pemerintah RI Tahun 2011 Tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lansia.
UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang No. 32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah. 2007. Visi Media: Jakarta.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2004, Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan sosial Lanjut Usia. Lihat pasal 3 ayat 2,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 6.
Unit Pelaksana Teknis Panti Wredha, 2002. Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Sosial Panti Wredha. Semarang: Dinas Kesejahteraan Sosial

C. WEBSITE

<https://bappeda.humas dan protokol siakkab.go.id/>

<https://bappeda.siakkab.go.id/>.

<http://siakkab.go.id/sejarah-siak/> di akses pada tanggal 21 November 2020.

<https://web.siakkab.go.id/tag/otonomi-daerah>.

Ibnumajjah, "Hak Lanjut Usia Dalam Islam", Website Ibnumajjah.

<https://ibnumajjah.wordpress.com/2012/09/26/hak-lanjut-usia-dalam-islam>

"World Healt Organization; Populasi Lansia di Dunia Semakin Bertambah", Situs ResmiVOA. <http://www.voaindonesia.com/content/who> (Akses 10 November 2020).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **PERAN DINAS SOSIAL DALAM
MENGAWASI PEKERJA LANJUT USIA POTENSIAL DI PT
KAMPARINDO AGRO INDUSTRI BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA**, ditulis oleh saudara :

Nama : BUDIMAN
NIM : 11720715206
Program Studi : Ilmu Hukum
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Selasa, 29 Desember 2020
Narasumber : Joni Alizon, S.H., M.H

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru, 05 Januari 2021
Narasumber

Joni Alizon, S.H., M.H

NIP/NIK. 130217041

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **"PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGAWASI PEKERJA LANJUT USIA POTENSIAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA DI PT KAMPARINDO AGRO INDUSTRI"**, yang ditulis oleh:

Nama : **BUDIMAN**
NIM : **11720715206**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

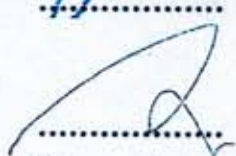
Ketua
Dr. Jenita, SE., MM



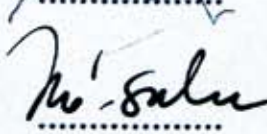
Sekretaris
Rudiadi, SH., MH



Penguji I
Hellen Last Fitriani, SH., MH



Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH



Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : BUDIMAN

NIM : 11720715206

JURUSAN : ILMU HUKUM

**JUDUL : PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGAWASI PEKERJA LANJUT
USIA POTENSIAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA DI PT KAMPARINDO AGRO
INDUSTRI**

Pembimbing: **MHD. KASTULANI, SH., MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021

A. Pimpinan redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL
NIP. 19880430 201903 1 010



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/628/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 07 Januari 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : BUDIMAN
NIM : 11720715206
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Dinas Sosial Kabupaten Siak dan PT Kamparindo Agro Industri
Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Dinas Sosial Dalam Mengawasi Pekerja Lanjut Usia Potensial DI PT Kamparindo Agro Industri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan


Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/36486
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/628/2021 Tanggal 1 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

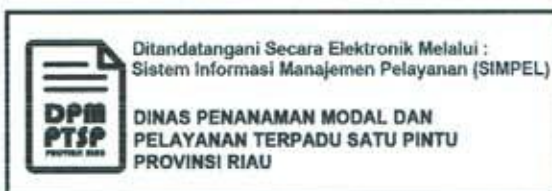
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | BUDIMAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11720715206 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGAWASI PEKERJA LANJUT USIA POTENSIAL DI PT KAMPARINDO AGRO INDUSTRI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS SOSIAL KABUPATEN SIAK
2. PT. KAMPARINDO AGRO INDUSTRI SIMPANG BELUT KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 Januari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura

SURAT KETERANGAN
No.001/PMKS/KAI/II/2021

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Syahputra

Jabatan : Kepala Tata Usaha

Alamat : Kompleks Perumahan PT. KAMPARINDO AGRO INDUSTRI

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Budiman

NIM/KTP : 11720715206

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Pekanbaru

Adalah benar telah meneliti tentang **PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGAWASI PEKERJA LANJUT USIA POTENSIAL DI PT.KAMPARINDO AGRO INDUSTRI** selama 1 Bulan Penuh dari Tanggal 01 s/d 28 Februari 2021.

Adapun surat keterangan ini dipergunakan untuk bahan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kandis, 28 Februari 2021

Hormat Kami



Bambang Syahputra

KTU



RIWAYAT HIDUP PENULIS

BUDIMAN, Penulis lahir di Dumai pada tanggal 08 April 1997 merupakan anak pertama dari dua bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Iptu Polisi Asnawi dan Ibu Kasini, Amd. Keb, Pada tahun 2003, penulis mulai mengecap dunia Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 001 Telaga Sam Sam, Kec. Kandis, Kab. Siak. Lulus pada tahun 2009. Setelah itu, pada tahun 2009 penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 7 Siak, dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Kandis dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2015, pada tahun yang sama berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan Pendidikan Strata-I (S-1) tepatnya di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2021.

Berkat rahmat dan karunia Allah Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul, **“Peran Dinas Sosial Dalam Mengawasi Pekerja Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Di PT Kamparindo Agro Industri”**, dibawah bimbingan langsung Bapak H. Mhd. Kastulani, SH., MH. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 28 Juli 2021, Penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.